

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

ACFTA adalah perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok dan negara anggota ASEAN untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, yang diawali dengan penurunan tarif preferensi. Sebagai anggota ACFTA Indonesia juga menjalankan skema penurunan tarif preferensi, dimulai dari EHP yaitu penurunan tarif terhadap komoditas di sektor pertanian. Bagi Indonesia skema penurunan tarif EHP dikelompokkan menjadi dua bagian diantaranya EHP ACFTA dan bilateral Tiongkok-FTA, dimana komoditas dalam skema EHP sudah disepakati oleh kedua negara melalui keputusan Menteri. Salah satu komoditas yang masuk ke dalam EHP bilateral Indonesia-Tiongkok FTA ialah karet alam. Melalui EHP bilateral Indonesia-Tiongkok FTA, tarif karet alam Indonesia dihapuskan menjadi 0% sehingga hambatan tarif komoditas tersebut dikurangi.

Karet alam merupakan komoditas unggulan pertanian Indonesia karena banyak berkontribusi terhadap perekonomian mulai dari sumber cadangan devisa negara, menambah pendapatan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila ditinjau kebelakang, Indonesia mulai mengekspor karet alam ke Tiongkok di tahun 2004. Atau di masa awal perdagangan internasional Indonesia dan Tiongkok secara aktif dimulai. Saat itu industri otomotif dan perkapalan Tiongkok sedang dikembangkan, menyebabkan kebutuhan terhadap karet alam tinggi. Dimulai dari masa itu Indonesia melihat adanya peluang dan mulai mengekspor karet alam. Pada tahun 2004 hingga 2009 ekspor terus meningkat, di sisi lain penurunan tarif melalui skema EHP sudah mulai dijalankan. Hingga di tahun 2010 ACFTA mulai diimplementasikan, tarif karet alam sudah dihapuskan menjadi 0%. Sejak dari masa awal ACFTA di 2010 sampai beberapa tahun seterusnya, ekspor karet alam Indonesia ke Tiongkok terus meningkat. Bahkan lebih baik lagi, sebab beriringan dengan tingginya permintaan Tiongkok akan karet alam. Dengan demikian dinamika ekspor karet alam Indonesia ke Tiongkok sebelum dan sesudah masa awal ACFTA diimplementasikan, cukup baik dan relatif meningkat.

Ekspor karet alam Indonesia ke Tiongkok yang awalnya berjalan lancar, tiba-tiba terhambat saat di tahun 2014 dikeluarkan suatu kebijakan baru bahwa akan dikenakan tarif bea masuk terhadap karet alam sebesar 20%, kepada seluruh negara yang mengimpor ke Tiongkok. Alasan Tiongkok mengeluarkan kebijakan tarif bea masuk karet alam, disebabkan oleh perusahaan otomotifnya sudah memproduksi ban yang dimana komponen karet alamnya hanya sampai 88%. Sehingga komponen karet alam yang lebih, akan dikenakan tarif bea masuk. Akhirnya saat kebijakan tarif bea masuk karet alam dijalankan pada tahun 2015, ekspor Indonesia ke Tiongkok menurun. Indonesia merasa ini tidak sesuai dengan apa yang di harapkan di ACFTA. Sehingga melakukan upaya diplomasi ekonomi untuk meningkatkan ekspor karet alam ke Tiongkok. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok untuk meningkatkan ekspor karet alam di tahun 2015 dan 2019, terbagi ke dalam bentuk diplomasi komersial dan diplomasi perdagangan.

Bentuk diplomasi komersial yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan ekspor karet alam ke Tiongkok terdiri dari tiga kegiatan. Pertama *business forum*, yaitu upaya untuk membangun kerjasama dengan Tiongkok melalui pemaparan yang disampaikan oleh perwakilan atase perdagangan KBRI dan Kementerian Perdagangan. Di dalam *business forum*, Indonesia juga mempromosikan karet alam kepada Tiongkok di sela pemaparan. Hasil dari *business forum* ialah timbulnya ketertarikan Tiongkok terhadap karet alam Indonesia, terlebih dari pihak swasta. Kedua *one on one business matching*, yaitu upaya untuk mempertemukan pengusaha karet alam Indonesia dengan Importir Tiongkok secara langsung agar dapat melakukan transaksi perdagangan. Tujuannya agar pengusaha karet alam Indonesia dapat memperkenalkan dan mempromosikan komoditas mereka kepada importir Tiongkok. Hasil dari *one on one business matching* yaitu Indonesia berhasil melakukan 10 transaksi perdagangan dengan importir karet alam Tiongkok. Ketiga partisipasi Indonesia di CAEXPO, yakni sebuah acara pameran internasional yang dihadiri oleh banyak importir termasuk Tiongkok. Dimana setiap tahun Indonesia selalu berpartisipasi di CAEXPO. Pada pameran tersebut, Indonesia berkesempatan untuk mempromosikan karet alamnya melalui paviliun yang sudah disediakan. Hasil dari keikutsertaan pada CAEXPO, Indonesia berhasil meningkatkan minat importir Tiongkok dengan karet alamnya.

Rachmasari Nur Al-Husin, 2021

**DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR KARET ALAM
DALAM KERANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) PERIODE 2015-2019**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id — www.library.upnvj.ac.id — www.repository.upnvj.ac.id]

Kemudian bentuk diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan ekspor karet alam ke Tiongkok terdiri dari dua kegiatan. Pertama partisipasi Indonesia di dalam AEM-MOFCOM, ialah pertemuan antara Menteri Perdagangan negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Tujuannya untuk berdiskusi dan menegosiasikan agar tarif karet alam bagi Indonesia dapat dihapuskan. Juga meminta fasilitas perdagangan melalui jaminan akses pasar bagi karet alam Indonesia. Hasil dari negosiasi dan diskusi di AEM-MOFCOM bahwa Tiongkok menyetujui untuk memberikan akses pasar lebih besar bagi karet alam Indonesia, namun penghapusan tarif karet alam tidak langsung disetujui. Kedua pertemuan bilateral Indonesia dan Tiongkok, dimana adanya diskusi dan negosiasi yang disampaikan. Indonesia meminta agar akses pasar bagi karet alamnya di Tiongkok lebih besar dan tarif dihilangkan. Selain itu mengajak Tiongkok untuk mendiskusikan mengenai penyelesaian masalah ACFTA yang tidak efektif, khususnya hambatan ekspor karet alam. Hasilnya kedua negara sepakat untuk membentuk tim pengkaji pemanfaatan ACFTA, sekaligus sebagai penyelesaian masalah hambatan para perdagangan kedua negara.

Secara garis besar diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok untuk meningkatkan ekspor karet alam di tahun 2015 sampai 2019 belum terlalu memberikan dampak yang signifikan. Terlihat bahwa pada tahun 2015 hingga 2016 jumlah ekspor masih berada di angka yang sama, barulah di tahun 2017 ekspor meningkat. Selanjutnya di tahun 2018 hingga 2019, ekspor mengalami penurunan yang jauh lebih parah. Berdasarkan hasil diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok, kegiatan yang dilakukan secara teori sudah benar dan sesuai. Namun ternyata di dalam implementasinya masih ada kekurangan dimana upaya diplomasi ekonomi khususnya diplomasi komersial, belum terfokuskan terkait karet alam dengan Tiongkok. Sedangkan di diplomasi perdagangan upaya sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pemerintah Indonesia, hanya sejaka terkait penurunan tarif belum berhasil dilakukan.

Terkait hambatan diplomasi komersial secara garis besar yaitu meningkatkan minat karet alam Indonesia kepada importir Tiongkok. Dikarenakan meskipun kerjasama sudah meningkat dan terjaminnya akses pasar, semua akan kembali lagi ke importir Tiongkok. Sedangkan hambatan diplomasi perdagangan yakni negosiasi penurunan tarif dalam kerangka ACFTA yang berhenti di tahun 2018. Meskipun akan diadakan *further*

liberalisation termasuk karet alam, namun hingga saat ini masih dalam proses pengkajian. Hambatan lainnya yang berimbas bagi diplomasi ekonomi ini, ialah pernyataan dari Tiongkok bahwa di tahun 2019 mereka ingin memproduksi karet alam secara domestik. Menyebabkan Tiongkok mengurangi impor karet alam, termasuk dari Indonesia.

6.2 Saran

Melalui penjelasan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok untuk meningkatkan ekspor karet alam di tahun 2015 hingga 2019, penulis memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha karet alam. Akan tetapi penulis akan memberikan beberapa saran terkait kelanjutan dari diplomasi ekonomi Indonesia pada sektor pertanian, khususnya karet alam. Dimulai dari saran praktis dikarenakan kegiatan diplomasi komersial khususnya *business forum* dan *one on one business matching*, yang diselenggarakan oleh pemerintah memaparkan banya sektor dan dengan berbagai negara. Dengan demikian penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia melaksanakan *business forum* dan *one on one business matching* secara khusus pada sektor pertanian khususnya karet alam saja. Sehingga fokus dari pemaparan dan promosi akan lebih detail dan spesifik. Begitupun juga kegiatan khusus dilakukan dengan Tiongkok. Serta dalam diplomasi komersial hendaknya pemerintah Indonesia lebih mengedepankan pemaparan di *business forum* dilakukan oleh pengusaha karet alam. Lalu terkait diplomasi perdagangan karena diikuti oleh negosiator yang hanya ahli dalam berdiplomasi, sebaiknya pemerintah juga mengajak ahli karet alam. Bisa dari Kementerian Pertanian sehingga kredibilitas negosiasi akan lebih dipercaya oleh Tiongkok.

Kemudian saran untuk pengusaha karet alam Indonesia dikarenakan tidak terlalu berpartisipasi aktif dalam *business forum*, hendaknya untuk lebih aktif lagi mengikuti kegiatan tersebut. Sebab saat pengusaha karet alam yang langsung memberika pemaparan, besar kemungkinan untuk menarik perhatian importir Tiongkok. Selain itu penulis juga menyarankan agar pengusaha karet alam Indonesia secara inisiatif menyelenggarakan expo B to B dengan importir Tiongkok, bisa diketuai oleh GAPKINDO. Sehingga tidak harus selalu menunggu expo yang diinisiasikan oleh pemerintah.

Selanjutnya untuk saran akademis dari teori dan konsep yang penulis gunakan, sudah sangat baik dalam membantu analisis. Secara teoritis konsep teori diplomasi ekonomi dalam bentuk diplomasi komersial dan perdagangan bisa digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis pertanyaan penelitian. Akan tetapi berdasarkan dari hasil penelitian terkait diplomasi komersial secara teori tidak dibahas secara detail mengenai pentingnya *business forum*, yang merupakan agenda pertemuan bisnis perwakilan negara untuk membahas peluang perdagangan. Sehingga melalui penelitian ini, penulis menemukan kegiatan lain dalam diplomasi komersial yang tidak disebutkan dalam teori.

Untuk penelitian kedepannya penulis sarankan untuk adanya kajian yang lebih mendalam mengenai diplomasi komersial, dengan menekankan peran dari sektor swasta dalam menyikapi hambatan dalam perdagangan bebas. Atau bisa juga melihat bagaimana bentuk kemitraan pemerintah dan swasta dalam diplomasi komersial untuk menyikapi permasalahan yang ada di perdagangan bebas. Dengan demikian akan lebih terlihat jelas upaya aktor non negara di dalamnya seperti apa saat sedang berkolaborasi dengan pemerintah.